

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Perjalanan dominasi politik ekonomi neoliberal global berimplikasi terhadap lingkungan hidup. Neoliberalisme sebagai bentuk baru dari kolonialisme berhasil menjadi hegemoni dominan, telah mengakibatkan perebutan keanekaragaman hayati, dehumanisasi mayoritas umat manusia di muka bumi, yang oleh karena itu harus dihentikan. Negara pemodal dan ilmu pengetahuan telah mereduksi alam menjadi komoditi yang bisa direkayasa untuk memperoleh keuntungan. Saat ini penghancuran lingkungan yang berupa pencurian keanekaragaman hayati melalui rezim paten, penyeragaman tanaman pertanian, perkebunan dan kehutanan serta modifikasi sumber-sumber hayati maupun pelayanan sosial, menjadikan negara tidak mampu lagi mempertahankan jati diri sebagai pelindung warga negara seperti dalam teori kontrak sosial. Persoalan lingkungan bukan hanya persoalan lemahnya kesadaran publik, tetapi juga lemahnya kebijakan negara. Negara menjadi lemah karena jebakan dan investasi sistem kebijakan neoliberalisme. Bencana menimpa masyarakat adat, kaum tani miskin, kaum miskin kota, kaum perempuan dan anak-anak, serta golongan terpinggirkan lainnya, justru terjadi akibat negara menghilangkan peran dan tanggung jawabnya untuk melindungi hak dan keselamatan rakyat dengan mengadopsi kebijakan neoliberal.

Gerakan lingkungan sebagai *New Social Movement* (Gerakan Sosial Baru) perlu semakin digalakkan. Gerakan lingkungan akan mengurus banyak hal, mulai dari mempersoalkan utang alias investasi yang berpotensi menyingkirkan rakyat, masalah kebijakan neoliberal, pemberlakuan paten atas kehidupan karena merupakan bentuk pencurian keanekaragaman hayati rakyat selatan melalui sistem pemberian hak kekayaan intelektual maupun pemberian monopoli pada TNCs (Trans National Corporations). Mengkampanyekan agar rakyat melakukan resistensi dan memboikot hasil produk pertanian melalui rekayasa genetika (GMO) yang belum tentu aman, semua itu merupakan agenda Gerakan Sosial Baru yang harus dilakukan.

Gerakan lingkungan perlu meneruskan usaha pendidikan politik rakyat, pemantauan dini, advokasi kebijakan untuk mencegah kebijakan neoliberal yang akan diterapkan. Akhirnya Gerakan lingkungan sebagai Gerakan Sosial Baru menjadi relevan mengantarkan bangsa untuk menjadi perisai dari invasi globalisasi neoliberalisme yang kian mengancam peradaban manusia dan kelestarian lingkungan hidup. Di atas adalah semangat yang diusung WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) dalam resistensinya terhadap agenda neoliberalisme, dimana WALHI dengan Manifestonya membuka sebuah babak baru dengan memperbarui format gerakan lingkungan untuk merespon agenda-agenda neoliberal. Berdasarkan uraian tersebut penulis mencoba melakukan penelitian dengan topik "Gerakan Lingkungan di Indonesia Sebagai Gerakan Sosial baru Melawan Neoliberalisme", dengan

B. Tujuan Penelitian

Dalam skripsi ini penulis memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan diharapkan, yaitu:

1. Ingin mengetahui tantangan-tantangan dan hambatan yang dihadapi WALHI melalui manifestonya dalam melawan neoliberalisme, dengan harapan untuk dapat melakukan gerakan yang lebih luas.
2. Ingin menerapkan teori-teori yang telah dipelajari di bangku kuliah. Tentunya teori yang relevan untuk menggambarkan kejadian-kejadian yang sedang berlangsung saat ini.
3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan tambahan literatur ilmiah bagi para akademisi yang tertarik terhadap studi gerakan lingkungan baru di berbagai belahan dunia khususnya di Indonesia.

C. Latar Belakang Masalah

Sejak kemunculan Gerakan Sosial Baru pada tahun 1990-an, gerakan sosial secara jelas menyatakan satu hal utama : *"There are Many Alternatives!"* (Ada Banyak Alternatif!). Ini adalah penolakan tegas atas visi satu arah neoliberalisme yang diajukan oleh tokoh utamanya, Margareth Thatcher, ketika ia mengatakan *"There Is No Alternatives!"* Pada dekade 1990-an tersebut, berbagai gerakan sosial bangkit kembali setelah sempat melambek pada akhir 1980-an karena keruntuhan Uni Soviet dan negara-

negara Eropa Timur. kebangkitan gerakan sosial baru tersebut merupakan akibat dari ekspansi berlebihan dari neoliberalisme di berbagai belahan dunia.¹

Gerakan sosial baru mendapat momentum luar biasa ketika terjadi konferensi *World Trade Organization/WTO* (Organisasi Perdagangan Dunia) di Seattle, Amerika Serikat, pada bulan November 1999. Berbagai gerakan perlawanan bersatu dalam aksi tersebut. Kaum pecinta alam, petani dari dunia pertama, anggota serikat buruh, anarkhis, feminis, punk, Aktivis HAM, wakil masyarakat adat, anak muda dan orang separo baya, warga Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Amerika Latin dan Asia, berkumpul di Seattle waktu itu.² Ini adalah momentum paling jelas dari kemunculan dan kebangkitan kembali Gerakan Sosial Baru di panggung dunia. Perlawanan yang dicanangkan di Seattle menjadi tonggak baru bagi Gerakan Sosial Baru bahwa sekarang semua gerakan sosial di seluruh dunia bangkit melawan neoliberalisme.

Bagi gerakan sosial seluruh dunia, kegagalan Konferensi WTO di Seattle merupakan sebuah kemenangan cantik tepat di penghujung milenium kedua yang menandai munculnya sebuah era baru gerakan sosial dunia.³ Kurang lebih ratusan ribu orang yang mewakili gerakan sosial di seluruh dunia dari negara maju, Negara berkembang dan negara miskin; dari seluruh kelas masyarakat, baik kelas pekerja, kelas menengah, masyarakat desa (petani dan masyarakat adat) ataupun masyarakat kota (gerakan lingkungan hidup dan

¹ Bonnie Setiawan, dalam pengantarnya berjudul, *Tujuan Gerakan Sosial Baru adalah Keambrokan Neoliberalisme*, dalam buku Bukan Sekedar Anti Globalisasi, Walhi dan IGJ, 2005

² Terjemahan Jurnal International Socialism, Chris Harman, *Anti-Capitalism: Theory and Practice*, No. 88, London, 2000 Oleh Julian dan Setia Budi.

³ Bonnie Setiawan, dalam pengantarnya berjudul, *Tujuan Gerakan Sosial Baru adalah Keambrokan Neoliberalisme*, dalam buku Bukan Sekedar Anti Globalisasi, Walhi dan IGJ, 2005

gerakan perempuan) dan dari hampir seluruh ideologi bersatu padu untuk menentang arogansi suatu lembaga dunia yang keluar dari mandatnya dan bertindak sebagai polisi lalulintas dunia untuk perdagangan.

Momentum berikutnya adalah penyelenggaraan Forum Sosial Dunia/FSD (*World Social Forum*) pertama di Porto Alegre, Brazil, sebagai tandingan dari Forum Ekonomi Dunia/FED (*World Economic Forum*) di Davos, Swiss; yang diikuti dengan Forum-Forum Sosial Dunia berikutnya. Isu-isu yang diangkat dalam Forum Sosial Dunia juga semakin luas, seperti anti perang, isu patriarki, isu minoritas, isu masyarakat adat, isu ekologi, isu gender dan isu-isu lainnya.⁴

Di Seattle, beberapa ornop dari Indonesia berpartisipasi dalam kegiatan ini, sedangkan WALHI bergerak bersama jaringan *Friends of the Earth International* (WALHI adalah FoE Indonesia). Kemenangan gerakan sosial dunia di Seattle bagi WALHI dan kekuatan rakyat lainnya, akan terus menjadi inspirasi bagi kegigihan dan keteguhan perjuangan melawan kecenderungan jahat liberalisasi maupun sebuah inspirasi bagi perjuangan masyarakat berbasis plural, luas, dan mondial. Sebenarnya yang utama bukanlah kegagalan sidang WTO itu sendiri, karena masih bisa diperdebatkan apakah kegagalan Seattle disebabkan tekanan para pendemo dan lobi-lobi mereka ataukah itu disebabkan oleh kontradiksi dan pertentangan di antara, delegasi sidang. Sebenarnya yang utama adalah lahirnya sebuah era baru gerakan sosial. Tentunya kita berharap gerakan yang berbasis plural, luas, dan mondial

⁴ Op-Cit, Hal. XIII

ini akan terus mengkristal dan bersifat lebih permanen dibandingkan gerakan di Seattle yang relatif cair.

WALHI, baik ditingkat lokal maupun internasional di antaranya melalui Jaringan *Friends of Earth* Internasional terus-menerus meningkatkan kepedulian pada isu-isu global, seperti utang luar negeri dan liberalisasi perdagangan. Di samping itu, isu-isu spesifik di bidang lingkungan hidup, seperti kehutanan, pertambangan, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim mau tak mau terkena imbasnya.

Di tingkat nasional, momentum Seattle membangkitkan inspirasi untuk membentuk jaringan-jaringan anti utang dan globalisasi neo-liberal. WALHI dengan beberapa elemen-elemen gerakan lainnya kemudian memprakarsai terbentuknya Koalisi Anti Utang (KAU) dan Koalisi Ornop Pemantau WTO yang kini berubah nama menjadi Koalisi Penentang WTO (KOP-WTO) yang paling tidak tercatat sekitar 150 organisasi baik dari kalangan ornop, gerakan perempuan, mahasiswa, kelas menengah profesional, buruh, kelompok miskin kota, petani, nelayan dan masyarakat adat. Demikian pula tercatat pula sekitar 40 organisasi tergabung dalam KOP-WTO.⁵

Dua tahun kemudian kembali WALHI bersama-sama elemen gerakan lain memprakarsai terbentuknya *Indonesian People Forum for Rio+10*. Secara umum, tujuan utama dibentuk forum ini adalah untuk meningkatkan partisipasi *civil society* di dalam proses persiapan Rio+10, baik nasional, regional maupun internasional. Adapun tujuan khusus dari *Indonesian People*

⁵ WALHI dan Gerakan Sosial Bersuara Dari Seattle Hingga Jakarta. <http://www.walhi.or.id>

Forum for Rio+10 adalah untuk dapat memasukkan pemikiran-pemikiran, ide-ide dan *concern* dari masyarakat.

Rio+10 sendiri merupakan pertemuan para kepala pemerintahan, kelompok-kelompok masyarakat yang peduli, badan-badan di bawah PBB, lembaga keuangan internasional dan aktor penting lain untuk menilai perubahan yang terjadi di seluruh dunia setelah "Earth Summit" atau "United Nations Conference on Environment and Development" (UNCED) yang pertama pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Dalam pertemuan Rio+10 di Johannesburg, akan dilakukan peninjauan terhadap 10 tahun pelaksanaan pembangunan berkelanjutan semenjak konferensi yang pertama di Rio de Janeiro. Pengevaluasian secara kritis akan menghasilkan sebuah review yang komprehensif dan terbuka, termasuk apa saja hambatan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menentukan tren ke depannya. Sebelum ke Johannesburg, akan ada pertemuan persiapan oleh Biro 10 (*Preparatory Committee*) sebanyak empat kali yang disebut dengan PrepCom I - IV. Pemerintah Indonesia mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan PrepCom ke IV yang berlangsung di Bali.⁶

Aksi dan refleksi yang terus menerus kemudian mendorong berbagai elemen gerakan merumuskan kembali gerakan. Diantaranya melahirkan kesepakatan untuk membangun Gerakan Indonesia Bangkit dan Berdaulat yang akan dideklarasikan dalam waktu dekat ini, sekaligus dengan

pendeklarasian 2003-2004 sebagai Tahun Anti Globalisasi dan Imperialisme.⁷

Tonggak gerakan lingkungan hidup telah ditancapkan dua dekade lalu. Antara lain, melalui aksi penyadaran publik dan advokasi kebijakan atas pentingnya lingkungan hidup dalam seluruh nafas pembangunan. Tapi kini gerakan lingkungan hidup tidak bisa lagi hanya mengandalkan kegiatan kampanye dan advokasi seperti di masa lalu. Gerakan lingkungan hidup perlu mencari ranah perjuangan baru untuk memperoleh dukungan publik yang lebih luas.⁸

Persoalan lingkungan hidup bukan persoalan pinggiran lagi, melainkan telah menjadi persoalan inti bagi keberlanjutan bangsa yang menghuni di sepanjang nusantara. Oposisi pada kapitalisme menjadi nafas baru gerakan lingkungan hidup dan gerakan sosial lain, karena kerusakan lingkungan hidup semakin dipahami sebagai akibat krisis-krisis sosial yang diproduksi oleh sistem kapitalisme global. Akumulasi pengerukan kekayaan alam dan penghisapan kekayaan alam dan tenaga-tenaga rakyat telah menyebabkan terjadinya krisis yang tidak terpulihkan. Krisis-krisis ini pada gilirannya telah mengancam kelangsungan sumber-sumber kehidupan rakyat. Krisis-krisis tersebut meliputi krisis politik, ekonomi, sosial budaya dan ekologi.

Gerakan lingkungan sebagai bagian dari gerakan sosial bangkit sebagai akibat dari pengrusakan alam yang terus terjadi yang disebabkan oleh logika neo-liberalisme yang terus melakukan hegemoninya terhadap negara-negara

dunia ketiga (di barat dan negara bekas komunis pula) melalui korporasi-korporasi transnasional. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) adalah salah satu gerakan lingkungan di Indonesia yang merespon agenda-agenda neoliberalisme tersebut, dimana dalam perkembangannya berusaha mencari ranah perjuangan baru untuk memperoleh dukungan publik yang lebih luas.

D. Pokok Permasalahan

Masalah-masalah lingkungan hidup seringkali tidak menjadi prioritas yang tinggi dan seringkali menjadi sub agenda, dengan demikian akhirnya larut dan tenggelam dalam tema-tema kampanye yang lebih luas dan abstrak. Bagaimana WALHI sebagai gerakan lingkungan menjawab tantangan sebagai sebuah gerakan sosial baru melawan Neoliberalisme?

E. Kerangka Dasar Pemikiran

1. Konsep Gerakan Sosial Baru

Konsep Gerakan Sosial Baru sangat erat kaitanya dengan globalisasi dan neoliberalisme, terutama sebagai aktor yang melakukan resistensi terhadapnya. Gerakan Sosial Baru (New Social Movements) sangat kosen terhadap persoalan kemanusiaan dan lingkungan hidup. Seperti dikemukakan oleh Dr.Mansour Fakhri dalam bukunya yang berjudul Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi :
"New Social Movements adalah gerakan sosial yang menentang pembangunan

dan globalisasi. Seperti gerakan hijau, feminisme, gerakan masyarakat akar rumput.”⁹

Gerakan Sosial Baru adalah gerakan anggota masyarakat yang secara kultural terlibat di dalam konflik sosial. Tujuan dan strateginya berikatan dengan masalah-masalah sosial dan memiliki rasionalitas sendiri. Lebih lanjut di jelaskan bahwa ada tiga hal penting dari gerakan sosial baru, yaitu : (1) Gerakan Sosial Baru (GSB) disebut ” Baru ” karena secara kualitatif berbeda dengan Gerakan Sosial Lama (GSL) seperti gerakan buruh dan petani yang memusatkan perhatian pada keadilan ekonomi dan politik.(2) Gerakan Sosial Baru (GSB) bertalian erat dengan isu sosial, (3) Gerakan Sosial Baru (GSB) terdiri dari kelompok-kelompok perorangan yang membentuk gerakan lebih besar.¹⁰

Gerakan-gerakan Sosial Baru terus tumbuh dimana-mana, dalam skala lokal, nasional, bahkan global. Gerakan Koalisi Anti Utang di Indonesia, serta berbagai koalisi Ornop melawan WTO adalah fenomena perlawanan sosial terhadap globalisasi. Masih banyak kasus bagaimana gerakan masyarakat di tingkat akar rumput melakukan perlawanan mereka terhadap neoliberalisme. Gerakan pembaruan agraria yang dikembangkan oleh Serikat Petani Sumatra Utara (SPSU) dan konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), gerakan petani ramah lingkungan oleh Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI), juga gerakan pembelaan hak-hak petani (Paysant rights) di Indonesia

⁹ Mansour Fakhri, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, INSIST Press, Yogyakarta, 2002, hal. 224

¹⁰ Menurut Tourine dalam *An Introduction to The Study of Social Movements*, sebagaimana dikutip Tareh Rasyid dalam tulisannya 13 Maret 2003 berjudul *Gerakan Perlawanan Rakyat Atas*

saat ini, pada dasarnya juga merupakan gerakan perlawanan sosial terhadap neo-liberalisme.¹¹

Ciri yang melekat pada Gerakan Sosial Baru (GSB) yang dapat membedakan dirinya dengan gerakan klasik yaitu, *pertama* kebanyakan GSB menaruh konsepsi ideologis mereka pada asumsi bahwa masyarakat sipil tengah meluruh, ruang sosialnya mengalami penciutan dan yang 'sosial' dari masyarakat sipil tengah di gerogoti oleh kemampuan kontrol negara. *Kedua*, secara radikal GSB mengubah paradigma Marxist yang menjelaskan konflik dan kontra-diksi dalam istilah 'kelas' dan konflik kelas. *Ketiga*, mengingat latar belakang kelas tidak menentukan identitas aktor ataupun menjadi penopang aksi kolektif, GSB pada umumnya mengabaikan organisasi serikat buruh industri, dan model politik kepertaian. Dengan beberapa pengecualian seperti kelompok hijau Jerman dan partai hijau. *Keempat*, berbeda dengan gerakan klasik, struktur GSB didefinisikan oleh pluralitas cita-cita, tujuan, kehendak dan orientasi, oleh heterogenitas basis sosial mereka.¹²

Yang menonjol dari pemikiran Gerakan Sosial Baru yakni kepedulianya pada isu-isu kemanusiaan dalam arti yang lebih luas. Artinya selama terdapat penindasan, ketidakadilan dan eksploitasi sebuah gerakan sosial baru akan bergerak melakukan resistensi, tanpa tersekat oleh batas wilayah mengingat globalisasipun berlaku di setiap wilayah serta berlaku dimana saja. Mereka adalah cerminan dari masyarakat yang kecewa atas tawaran marxisme yang menempatkan gerakan sosial terbatas pada perjuangan kelas. Padahal masih

¹¹ Mansour Fakih, *Pembangunan Pelajaran Apa yang Kita Peroleh?*, Pengantar Jurnal wacana, edisi 5 tahun II, INSIST Press, Yogyakarta, 2000, hal.13.

terdapat banyak permasalahan seputar eksploitasi yang dilakukan oleh kapitalisme global seperti ekologi, ras dan gender.

Adakalanya faktor ideologi tidak akan ada dalam gerakan sosial. Massa akar rumput misalnya, walaupun berpihak pada gerakan, namun mereka tidak memahami ideologi yang dijadikan basis gerakan. Namun demikian, terdapat faktor penting dari ideologi yakni sebagai upaya menumbuhkan spirit dan solidaritas dari massa. Mereka akan merasakan sebagai satu nasib jika dapat direkayasa dalam sebuah ideologi.¹³ Sebagaimana watak dari Gerakan Sosial Baru yang terbuka, maka ideologi merikapun terbuka, sehingga kesamaan akan keprihatinan terhadap Globalisasi dapat menyatukan mereka tanpa tersekat oleh landasan ideologi masing-masing gerakan.

2. Konsep Neoliberalisme

Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik yang mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik. Paham ini memfokuskan pada metode pasar bebas, pembatasan yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi. Neoliberalisme bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar, dengan membenaran mengacu pada kebebasan. Seperti pada contoh kasus upah pekerja, dalam pemahaman neoliberalisme pemerintah tidak berhak ikut campur dalam penentuan gaji pekerja atau dalam masalah-masalah

¹³ Zaiyaedam Zibir, *Radikalisme Kaum Pinggiran*, INSIST Press, Yogyakarta, 2002

tenaga kerja sepenuhnya ini urusan antara si pengusaha pemilik modal dan si pekerja.¹⁴

Neoliberalisme memfokuskan diri pada faktor-faktor yang berpengaruh, seperti pemerintahan demokratik, pendapat umum, pendidikan untuk rakyat, perdagangan bebas, organisasi dan hukum internasional, pengawasan dan pelucutan senjata, pengawasan bersama antar negara dan diplomasi multilateral, dan etika global untuk meningkatkan taraf hidup di dunia ini. Sebab kaum neoliberal ini merasa bahwa perubahan kondisi global sebagai peningkatan usaha-usaha kerja sama. Para teoritikus neoliberal tetap mempertahankan ide-ide dan tujuan-tujuan mulia dari warisan paham liberal yang dapat menggambarkan, menjelaskan, memprediksi dan menentukan situasi dunia pasca perang dingin.¹⁵

Paham neoliberal bertumpu pada tiga hal fundamental, yaitu perdagangan bebas barang dan jasa, perputaran modal yang bebas dan kebebasan berinvestasi. Menurut argumentasi mereka, segala intervensi pemerintah di dunia ekonomi semenjak tahun 1930-an hanya mengakibatkan industri-industri menjadi pemboros yang tidak efisien. Ambruknya blok Soviet, serta kemandegan dan kesengsaraan Amerika Selatan dan Afrika, menurut mereka telah membuktikan betapa celaknya konsekuensi intervensi pemerintah. Kemiskinan di dunia ketiga hanya dapat diatasi dengan menerapkan kebijakan pasar bebas, melalui kegiatan WTO, IMF dan Bank Dunia.¹⁶

¹⁴ Diakses dari Wikipedia online Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia

¹⁵ Charles W. Kegley, Jr. Eugene R. Wittkopf, *World Politics Trend and Transformation*, Boston New York, 1999, p. 34

¹⁶ Terjemahan Jurnal International Socialism, Chris Harman, *Anti-Capitalism: Theory and Practice*, No. 88, London, 2000 Oleh Julian dan Setio Budi

Seperti paham realisme dan neoliberalisme, paham neoliberalisme juga tidak mewakili oleh karenanya tidak bisa dianggap sebagai sebuah gerakan intelektual atau paham pemikiran tertentu. Neoliberal berlaku pada beberapa asumsi, yang mengevaluasi beberapa aspek dari proses-proses perubahan di dunia Internasional dan menyuguhkan satu ide kerjasama. Untuk beberapa hal, seperti juga neorealisme, neoliberalisme juga merambah ke ranah struktur teori yang mengevaluasi karakteristik-karakteristik yang ada pada sistem-sistem internasional. Selain itu, memfokuskan diri pada karakteristik unit-unit dan sub unit-unit yang terdiri dari bagian-bagiannya, pimpinan negara. Penganut paham neoliberal yang lainnya berfokus pada pengaruh organisasi-organisasi internasional seperti PBB dan para pelaku bukan negara seperti perusahaan-perusahaan multinasional. Semua pengikut paham neoliberalisme, meskipun memiliki beberapa karakter dan fokus kajian, tetap memiliki satu kesamaan yakni mereka hendak meneliti dan mengkaji konvergensi dan overlapping (tumpang tindih) antara entitas kedaulatan politik yang saling berlawanan sedemikian hingga memungkinkan terjadi saling kerjasama.¹⁷

Doktrin-doktrin neo-liberal pertama diucapkan dalam ideologi konservatif yang dijuluki "*Thatcherism*" di Inggris dan "*Reaganomics*" di Amerika. Kemudian logika neoliberal disambut oleh golongan sosial demokratik dalam program "*The Third Way*" yang juga pro-kapitalis. Ide-ide neoliberal menjadi pondasi bagi kebijakan-kebijakan lembaga-lembaga internasional

seperti WTO, IMF dan Bank Dunia, dan program-program "reformasi ekonomi" yang diajukan oleh para politikus dan ahli ekonomi.¹⁸

Pilar utama ideologi neoliberal adalah, bahwa aparatus negara seharusnya tidak ikut berperan dalam kegiatan-kegiatan pokok ekonomi nasional maupun internasional. Kita diajak kembali ke gagasan ortodoks yang bercokol sebelum depresi tahun 1930-an, yang dianjurkan oleh Adam Smith dan dipopularisasikan oleh Jean-Baptiste Say. Gagasan ini dikenal sebagai "liberalisme ekonomi" waktu itu, jadi versi baru dikenal dengan nama "neo-liberalisme". Jargon yang diusung dalam konsep neoliberalisme adalah deregulasi, privatisasi dan liberalisasi. Ramuan dasar inilah yang merasuk ke dalam lembaga-lembaga keuangan internasional (Bank Dunia, IMF) dan WTO, serta terefleksikan dalam kebijakan-kebijakan mereka, yang kemudian kesepakatan ini dikenal sebagai *Washington Consensus*.¹⁹ Akan tetapi, berbagai program yang diajukan oleh lembaga-lembaga tersebut tidak sesuai dengan misi sesungguhnya. Kebijakan-kebijakan IMF dan Bank Dunia lebih menguntungkan Negara kaya. Berbagai kebijakan privatisasi perusahaan Negara telah meluruhkan peran Negara sebagai pemberi subsidi yang sangat dibutuhkan rakyat miskin.

Kebijakan lembaga-lembaga keuangan internasional tersebut selalu mengarah kepada privatisasi (yang selalu didahului oleh restrukturisasi) dan liberalisasi lewat mesin mereka: pinjaman (*loan*). Setiap pinjaman yang diberikan kepada negara-negara debitor selalu disertai prasyarat (*conditionalities*) yang

¹⁸ Terjemahan Jurnal International Socialism, Chris Harman, *Anti-Capitalism: Theory and Practice*, No. 88, London, 2000 Oleh Julian dan Setia Budi.

¹⁹ Jurnal Wacana 12, Tahun III: *Lingkungan Versus Kapitalisme Global*, INSIST Press, Yogyakarta, 2002, hal. 12

lebih dikenal sebagai Program Penyesuaian Struktural (*Structural Adjustment Programme/SAP*). Fungsi utama SAP adalah untuk merombak sistem lama di suatu negara agar sesuai dengan mekanisme pasar bebas yang diusung oleh paham neoliberal.²⁰ Lembaga-lembaga tersebut menjadi pendukung utama model ekonomi neoliberal yang semakin memiskinkan jutaan penduduk miskin di dunia. Hal ini karena kebijakan-kebijakan mereka memang tidak ada kaitannya dengan penghapusan kemiskinan.

Dalam pandangan Gramsci, keadaan ini digambarkan dengan apa yang disebut sebagai 'blok historis', dimana 'negara integral' (masyarakat politik ditambah masyarakat sipil) telah mengatasi fase korporatif-ekonomisnya. Gramsci bergerak dalam satu pandangan tentang negara sebagai instrumen dari sebuah kelas. Negara adalah Negara kelas yang menciptakan kondisi-kondisi yang di bawah kelas tertentu dapat berkembang secara penuh, namun ia bertindak atas nama kepentingan universal dalam sebuah lapangan yang secara konstan merubah equilibrium antara kelas dominan dan kelas pinggiran.²¹ Hegemoni didukung oleh sarana penekan (masyarakat politik) dimana kapitalis internasional dengan perangkat hegemoni-nya (propaganda neoliberalisme: pasar bebas, kompetisi dan pengetatan anggaran) didukung dengan sarana penekannya (organisasi internasional, negara dengan kebijakan penekan dari keduanya) mempengaruhi

²⁰ Ibid

²¹ Antonio Gramsci dalam: *Negara dan Hegemoni*, oleh Nezar Patria dan Andi Arief, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal. 154

pola tindakan Ornop dan serikat buruh beserta pola hubungannya sebagai bagian dari masyarakat sipil.²²

Revolusi neoliberalisme ini bermakna bergantinya sebuah manajemen ekonomi yang berbasiskan persediaan menjadi berbasis permintaan. Sehingga menurut kaum Neoliberal, sebuah perekonomian dengan inflasi rendah dan pengangguran tinggi, tetap lebih baik dibanding inflasi tinggi dengan pengangguran rendah. Tugas pemerintah hanya menciptakan lingkungan sehingga modal dapat bergerak bebas dengan baik. Dalam titik ini pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan memotong pengeluaran, memotong biaya-biaya publik seperti subsidi, sehingga fasilitas-fasilitas untuk kesejahteraan publik harus dikurangi.

Akhirnya logika pasarlah yang berjaya diatas kehidupan publik. Ini menjadi pondasi dasar neoliberalisme, menundukan kehidupan publik ke dalam logika pasar. Semua pelayanan publik yang diselenggarakan negara harusnya menggunakan prinsip untung-rugi bagi penyelenggara bisnis publik tersebut, dalam hal ini untung-rugi ekonomi bagi pemerintah. Pelayanan publik semata, seperti subsidi dianggap akan menjadi pemborosan dan inefisiensi. Neoliberalisme tidak mengistimewakan kualitas kesejahteraan umum.

Satu kelebihan neoliberalisme adalah menawarkan pemikiran politik yang sederhana, menawarkan penyederhanaan politik sehingga pada titik tertentu politik tidak lagi mempunyai makna selain apa yang ditentukan oleh pasar dan

²² Carnoy, Martin. 1984. *The State and Political Theory*, Princeton University Press, New Jersey. Hal 65 disadur dari Patria, Nezar dan Arief, Andi. 1999. Antonio Gramsci: *Negara dan Hegemoni*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 8-10

pengusaha. Dalam pemikiran neoliberalisme, politik adalah keputusan-keputusan yang menawarkan nilai-nilai, sedangkan secara bersamaan neoliberalisme menganggap hanya satu cara rasional untuk mengukur nilai, yaitu pasar. Semua pemikiran diluar rel pasar dianggap salah. Kapitalisme neoliberal menganggap wilayah politik adalah tempat dimana pasar berkuasa, ditambah dengan konsep globalisasi dan perdagangan bebas sebagai cara untuk perluasan pasar melalui WTO, akhirnya kerap dianggap sebagai Neoimperialisme.

Dari kedua konsep di atas, penulis melihat adanya suatu hubungan yang kontra-diktif antara Gerakan Sosial Baru vis a vis Neoliberalisme. Gerakan Sosial baru menaruh konsesi ideologis mereka pada asumsi bahwa masyarakat sipil tengah meluruh, ruang sosialnya mengalami penciutan. Yang menonjol adalah kepeduliannya terhadap isu-isu kemanusiaan dalam arti yang lebih luas dimana tidak lagi terbatas pada ideologi tertentu, tetapi lebih mengedepankan pluralitas cita-cita, tujuan, kehendak dan orientasi, oleh heterogenitas basis sosial mereka sebagai manifestasi terhadap ketidakadilan dan kesengsaraan rakyat.

Dalam hubungannya dengan neoliberalisme, Gerakan Sosial Baru mengalami ketidaksesuaian dimana neoliberalisme selalu mengatasnamakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan membebaskan arus modal dan kekuasaan pasar dari negara. Pembukaan pasar seluas-luasnya akan dibarengi dengan mengalirnya modal secara luas pula, sehingga akumulasi modal tanpa pengawasan negara hanya akan menguntungkan segelintir orang saja, yaitu kaum pemilik modal. Penguatan konsep neoliberalisme yang dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan internasional dan WTO akan mengatur mekanisme

pasar bagi negara debitor (yang diberikan pinjaman) dan negara-negara miskin maupun berkembang di dunia ketiga. Rumusan berupa deregulasi, privatisasi dan liberalisasi yang diikuti dengan pemotongan subsidi dari negara terhadap rakyat (pelayanan sosial) akan terefleksikan melalui kebijakan-kebijakan yang telah disepakati antara negara dan lembaga-lembaga keuangan tersebut melalui prasyarat-prasyarat atau yang disebut dengan SAP (*Structural Agreement Programme*).

Keberpihakan negara yang telah berpaling kepada pemilik modal yaitu perusahaan-perusahaan besar lintas negara yang berbasis negara maju atau Perusahaan Trans Nasional (TNCs/Trans National Companies). Perusahaan tersebut merasuki sistem yang ada pada negara dan kemudian merubahnya untuk disesuaikan dengan mekanisme pasar bebas paham neoliberal. Pada akhirnya, hal ini menimbulkan perlawanan dari kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap ketidakadilan yang menimpa rakyat tersebut. Kelompok-kelompok inilah yang kemudian disebut sebagai Gerakan Sosial baru, dimana mereka menaruh perhatian luas disegala aspek dan wilayah, tanpa terbatas oleh struktur kelas maupun ideologi tertentu. Kelompok-kelompok tersebut berasal dari berbagai sektor mulai dari pecinta lingkungan, kaum feminis, anggota serikat buruh, masyarakat adat, masyarakat miskin kota dan lain sebagainya

Pada konteks lingkungan, kita akan dapat mengetahui bagaimana neoliberalisme dapat mengakibatkan degradasi lingkungan sehingga harus mendapatkan perlawanan dari Gerakan Lingkungan. Sebagai contoh adalah

program liberalisasi sektor sumber daya alam di Indonesia.

Bank Dunia dengan skema *watsal* atau *water resources sector adjustment loan*. Air dinilai sebagai barang ekonomis yang pengelolaannya pun harus dilakukan sebagaimana layaknya mengelola barang ekonomis. Dimensi sosial dalam sumberdaya *public goods* direduksi hanya sebatas sebagai komoditas ekonomi semata. Hak penguasaan atau konsesi atas sumber daya air ini dapat dipindah tangankan dari pemilik satu ke pemilik lainnya, dari satu korporasi ke korporasi lainnya, melalui mekanisme transaksi jual beli. Selanjutnya sistem pengaturan beserta hak pengaturan penguasaan sumber air ini lambat laun akan dialihkan ke suatu badan berbentuk korporasi bisnis atau konsorsium korporasi bisnis yang dimiliki oleh pemerintah atau perusahaan swasta nasional atau perusahaan swasta atau bahkan perusahaan multinasional dan perusahaan transnasional.²³

F. Hipotesis

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa proses hegemoni neoliberalisme telah mendorong WALHI menjadi sebuah kekuatan sosial baru, sehingga dengan manifestonya WALHI telah membuka babak baru gerakan lingkungan, yaitu memperbarui format Gerakan lingkungan sebagai sebuah Gerakan Sosial Baru (New Social Movement).

G. Jangkauan Penelitian

Dalam melakukan setiap penelitian sangat diperlukan penetapan jangkauan penelitian atau batasan penelitian. Hal ini dilakukan supaya

²³ Diakses dari Wikipedia online Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia

penelitian lebih terfokus dan mengarah pada sasaran masalah. Dalam skripsi ini penulis akan membatasi penulisan sejak Konferensi WTO di Seattle tahun 1999 sampai pada keluarnya Manifesto WALHI tahun 2005. alasan penulis pada Konferensi Seattle merupakan puncak dari aksi menentang Globalisasi dan agenda neo-liberalisme, dimana terdapat berbagai gerakan dengan berbagai latar belakang dan ideologi masing-masing yang berkumpul dan menyamakan visi untuk melakukan aksi tersebut di Seattle, yang kemudian digolongkan sebagai Gerakan Sosial baru. Sedangkan dikeluarkannya Manifesto WALHI pada tahun 2005 merupakan bagian dari aksi WALHI sebagai sebuah Gerakan Lingkungan yang merupakan bagian dari Gerakan Sosial Baru yang menentang agenda neo-liberalisme.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan metode deduktif, dengan berdasarkan kerangka teori kemudian ditarik suatu hipotesis yang akan dibuktikan melalui data empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan studi pustaka dan studi kasus. Data primer akan diolah berdasarkan penelitian yang akan dilakukan di WALHI itu sendiri. Sedangkan data sekunder bersumber dari literatur-literatur, makalah-makalah ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, majalah-majalah, surat kabar, situs-situs internet dan sumber-

Sumber data yang merupakan sumber primer dan sekunder serta penulisan yang dilakukan dengan standar penulisan ilmiah, maka penulis yakin bahwa dengan cara ini tidak akan mengurangi validitas penulisan ini.

I. Sistematika Penulisan

Sebuah karya penelitian dapat dikatakan ilmiah atau tidak salahsatunya dilihat dari sistematika penulisan. Dengan demikian penulisan yang sistematis menjadi salah satu syarat mutlak untuk kaidah penelitian yang ilmiah. Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang memuat berbagai ketentuan metodologis berupa alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

Bab II, membahas Gerakan Lingkungan sebagai bagian dari Gerakan Sosial Baru, yang diawali dengan sejarah latar belakang Gerakan Lingkungan di Indonesia, kemudian Gerakan Lingkungan paska Seattle 1999 serta WALHI sebagai Gerakan Lingkungan yang merupakan bagian dari Gerakan Sosial Baru.

Bab III, membahas Neoliberalisme secara umum yang meliputi: dampak-dampak neoliberalisme terhadap kelestarian lingkungan hidup. Yang kemudian dilanjutkan dengan hegemoni neoliberalisme dan kapitalisme global,

serta pembahasan Gerakan Lingkungan terhadap neoliberalisme

Bab IV, membahas sikap dan respon WALHI terhadap Neoliberalisme, yang meliputi bentuk kongkrit dari sikap dan respon tersebut, yang diwujudkan dalam Manifesto WALHI tahun 2005 dan perjuangan WALHI.

Bab V, Kesimpulan yang berusaha menegaskan hasil penelitian, yaitu bahwa hipotesis yang dikemukakan bisa dibuktikan dengan baik-baik